

Building Resilience in Preventing Violent Extremism through  
Moderate Religious Education in Indonesia - **CONVEY Indonesia**

# Policy Brief Series

Issue 4 | Vol. 3 | 2020

Policy Brief Series ini dibuat sebagai bagian dari proyek CONVEY Indonesia yang diselenggarakan PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia.

CONVEY Indonesia dimaksudkan untuk membangun perdamaian di Indonesia dan mencegah ekstremisme dengan kekerasan dan radikalisme melalui serangkaian riset, survei, advokasi kebijakan, dan interaksi publik yang berbasis pada potensi pendidikan agama. Proyek CONVEY Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebinekaan, dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda.

## Pendidikan Agama dan Kebangsaan: Ke Mana Arah Partai Politik?



## Pengantar

Studi tentang partai politik dan kebijakan pendidikan agama (Islam) belum banyak dilakukan. Padahal, perhatian serius terhadap pendidikan agama yang melibatkan politisi sangat penting karena dari institusi pendidikan lah generasi mendatang yang diharapkan mampu menciptakan perdamaian. Selain itu, polarisasi pandangan partai politik hanya terjadi dalam isu-isu yang terkait agama, sementara pada isu lainnya tidak terjadi polarisasi pandangan partai politik (Muhtadi, 2018).

Sistem pendidikan agama di Indonesia sudah berusia panjang, bahkan lebih tua dari negara Indonesia. Tantangan dalam pendidikan agama saat ini adalah kemajemukan. Indonesia mengakui keberadaan enam agama yang diakui negara dan aliran kepercayaan. Dalam konteks tersebut, maka yang baik adalah pendidikan agama yang mampu membentuk individu yang memiliki kemampuan untuk menerima dan berinteraksi dengan perbedaan. Akan tetapi, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), sikap intoleran terhadap orang yang berbeda agama meningkat di kalangan siswa, mahasiswa dan guru. Peningkatan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh pendidikan agama. Riset PPIM 2017 menunjukkan 48,95 persen siswa/mahasiswa merasa pendidikan agama memiliki porsi yang besar dalam memengaruhi mereka agar tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Gejala intoleransi ini terlihat di setiap jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

Oleh karena itu, perlu dipelajari secara mendalam untuk mengetahui kebijakan dan kegiatan apa yang telah dilakukan partai politik terkait dengan pendidikan agama, dan bagaimana partai politik memainkan peran mereka di bidang pendidikan yang dalam beberapa dekade terakhir telah disusupi dengan pandangan intoleransi dan radikalisme, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian PPIM UIN Jakarta (2016, 2017, dan 2018).

Peran partai politik sangat krusial dalam proses legislasi dan pembentukan regulasi tersebut.

Regulasi yang dimaksud tidak hanya pada level nasional, namun juga di level daerah tingkat satu maupun tingkat dua. Dengan demikian partai politik secara tidak langsung memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang konsisten dengan semangat toleransi demi ketahanan bangsa.

Tulisan ini akan mendeskripsikan bagaimana partai politik peserta Pemilu 2019 memandang pendidikan agama di Indonesia. Pandangan ini dilihat dari visi, misi, dan program partai politik yang dapat diakses dalam website resmi partai politik, pernyataan tokoh partai politik dalam media, serta data wawancara dengan tokoh dan pengurus 16 partai politik peserta pemilu 2019. Triangulasi data tersebut digunakan untuk menjawab sejauh mana partai politik memiliki program terkait isu pendidikan agama. Terakhir, sejumlah rekomendasi akan disampaikan untuk memperkuat pendidikan agama di Indonesia.

## Metode Penelitian



### Sumber Data

- AD/ART Parpol
- Program & Kebijakan Parpol
- Pernyataan Tokoh Parpol di Media
- Hasil Wawancara



### Informan

- 46 Orang
- dari 16 Partai Peserta Pemilu 2019



### Analisis Data

- Tren & Pola Respon



### Metode

- Triangulasi dari Studi Dokumen & Wawancara



### Peneliti

- 6 Peneliti
- 6 Asisten Peneliti



### Durasi Penelitian

- 17 Juni - 16 Agustus 2019

## Partai Politik Peserta Pemilu 2019



## Kebijakan Pendidikan Agama

Pendidikan agama memiliki kedudukan yang penting dalam pendidikan nasional. Dimuat dalam UU Sisdiknas 2003 nomor 20 pasal 3 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selanjutnya demi mewujudkan tujuan pendidikan, pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa di dalam kurikulum pendidikan wajib memuat pendidikan agama. Hal ini mengisyaratkan bahwa tujuan pendidikan nasional berusaha untuk mewujudkan manusia Indonesia yang beragama dan bermoral demi menciptakan kerukunan bangsa.

## Visi dan Misi Partai Politik tentang Pendidikan Agama

Partai politik kurang memiliki visi dan misi yang spesifik tentang pendidikan agama. Pendidikan dan keagamaan merupakan dua ranah berbeda yang menjadi perhatian partai politik dalam agenda yang tersurat dalam anggaran dasarnya. Ketiadaan visi dan misi partai politik yang spesifik tentang pendidikan agama berefek pada absennya agenda partai politik secara khusus dan kuat tentang pendidikan agama. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama belum menjadi konsen yang kuat bagi partai politik bahkan dalam konteks nasional. Pendidikan agama masih menjadi bagian dari pendidikan nasional sebagai standar keberhasilan lembaga pendidikan.

## Pandangan tentang Pendidikan Agama

Pandangan partai politik tentang pendidikan agama yang ideal, masing-masing partai politik memiliki penjelasan yang relatif filosofis dan teleologis. Secara ide, partai politik memiliki pemikiran dan konsepsi yang relatif bagus, namun belum terkonsepsikan menjadi agenda partai politik secara sistematis untuk kemudian diperjuangkan baik dalam konteks kebijakan maupun program konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pendidikan, terlebih pendidikan agama menjadi bagian dari kerangka umum kerja partai yang tidak terpola secara khusus. Pandangan partai politik terhadap pendidikan agama, juga terhadap pendidikan, ditempatkan sebagai faktor strategis bagi penguatan nilai-nilai, orientasi, dan kepribadian bangsa tanpa program yang tersusun secara terukur. Kerangka besar yang menjadi landasan justifikasi atas urgensi pendidikan agama yang toleran dan berbasis kebangsaan didasarkan pada visi, misi, dan anggaran dasar partai yang serba mencakup dalam konteks kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan bhinneka tunggal ika. Untuk itu, konsepsi yang disodorkan partai politik tentang pendidikan agama menjadi sangat relevan dengan semangat

kebangsaan karena landasan akhir adalah terbentuknya manusia yang cerdas, berketuhanan, bertakwa, dan bermoral sebagai cermin dari ideologi Pancasila.

Karena konsepsi partai politik yang sangat luas terkait pendidikan agama, pemaknaannya pun memiliki perbedaan ketika dihadapkan pada peraturan yang bernuansa agama. Bagi sebagian partai politik, masalah peraturan bernuansa agama merupakan keniscayaan sebagai konsekuensi logis dari aktualisasi nilai keagamaan yang termaktub dalam ideologi negara, Pancasila. Sebagian lagi lebih memahami peraturan bernuansa agama, termasuk dalam dunia pendidikan umum, merupakan bentuk pragmatisme atas kepentingan elektoral dan bersifat lokal, dan sebagian lagi melihatnya sebagai bentuk deviasi atas kebinekaan. Keragaman sudut pandang ini menunjukkan belum utuhnya sikap partai politik dalam menempatkan satu kasus terkait relasi agama dan negara yang berujung pada pemaknaan secara subyektif masing-masing partai.

Secara umum, partai politik mengakui tentang adanya deviasi atas semangat kebinekaan dan kebangsaan yang ditopang oleh pemahaman keagamaan yang eksklusif. Pandangan partai politik tersebut sejatinya menjadi pintu masuk untuk menguatkan pendidikan keagamaan yang moderat dan ramah kemajemukan. Langkah ini prospektif, karena posisi partai politik yang sangat strategis dalam mempengaruhi kebijakan negara. Namun tidak kalah pentingnya adalah perlunya konsepsi dan pemahaman yang utuh terhadap pendidikan keagamaan yang moderat, toleran, dan ramah kebinekaan karena belum adanya komitmen kuat dan pemahaman yang parsial dari partai politik terkait urgensi dan model pendidikan keagamaan bagi masyarakat yang beragam.

## Tipologi Pandangan Parpol tentang Pendidikan Agama

Pandangan partai politik di Indonesia terkait pendidikan agama dapat dipilah menjadi tiga tipologi, yaitu partai Islamis, partai nasionalis religius, dan partai nasionalis. Hasil ini didapatkan

dari penelitian pandangan partai politik tentang pendidikan agama. Penelitian ini menggunakan data AD/ART partai politik, program yang disosialisasikan melalui website resmi partai politik serta data wawancara dengan tokoh partai politik.

Kelompok pertama, Partai Islamis yang meliputi: a). Islamis Modernis seperti PKS, PPP, PBB dan PAN. PKS dan PPP fokus pada supremasi keunggulan Islam dalam pendidikan agama. Sementara PBB adalah Modernis-Formalistik, memfokuskan aspek modernis yang bernuansa ke-Indonesia-an, tidak setuju dengan adopsi keislaman ala Salafi-Wahabi dari Timur Tengah. PAN juga mengembangkan gagasan pendidikan agama modernis dengan menekankan pada integrasi agama dalam semua mata pelajaran, sekaligus juga meneguhkan perlunya pendidikan agama yang mendorong pluralisme/kemajemukan; b). Islam Moderat-Tradisionalis seperti PKB yang mempromosikan pentingnya memperkuat institusi pendidikan tradisional ala pesantren dan madrasah serta mengakomodasi budaya lokal sebagai cara memperkuat Islam moderat yang bertumpu pada *rahmatan lil 'alamin* sekaligus sebagai upaya membendung paham radikalisme.

Kelompok kedua, partai politik nasionalis religius. Kelompok ini mendukung pendidikan agama dan agenda-agenda keagamaan dalam ranah politik, namun tidak terlalu masuk ke dalam kebijakan sekolah. Partai politik ini menekankan pada perlunya keseimbangan antara negara/kebangsaan dan religiusitas/keagamaan.

Kelompok ketiga, partai politik nasionalis seperti PDIP yang menekankan bahwa pendidikan agama sebagai subordinat Wawasan kebangsaan. Bagi PDIP, Pendidikan Pancasila merupakan aspek paling utama dari pendidikan agama. PDIP cenderung menolak peran negara dalam agama, atau setidaknya negara jangan terlalu turut campur karena agama adalah wilayah privat. PDIP melihat bahwa pendidikan agama dewasa ini cenderung Islamis. Selain PDIP, PSI merupakan partai politik yang memiliki pandangan bahwa Pendidikan agama yang ideal dapat mendorong diterapkannya *religious studies* agar dapat menumbuhkan sikap saling memahami antar







## Building Resilience in Preventing Violent Extremism through Moderate Religious Education in Indonesia

Gedung PPIM UIN Jakarta  
Jalan Kertamukti No. 5 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia  
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: [pmu.convey@gmail.com](mailto:pmu.convey@gmail.com) | Website: <https://conveyindonesia.com>

### Collaborative Program:



*Empowered lives.  
Resilient nations.*